

BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 2001 memberikan otonomi yang lebih luas terhadap daerah dengan UU Nomor 22/1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah, maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran, yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha mencapai efisien dan efektif dan lebih bertanggung jawab (Suwandi, 2000).

Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, di mana Kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem

pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Selain sumber tersebut, dana pemerintah diperoleh dari bantuan pendapatan transfer pemerintah pusat, terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak, pendapatan dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan dana alokasi khusus (DAK). Artinya pemerintah daerah selain memperoleh dan menggali potensi daerah, pemerintah daerah juga memperoleh bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mengalokasikan secara tepat pendapatan yang diperoleh kedalam pengeluaran sehingga terjadinya keserasian anggaran.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap keserasian anggaran. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan keserasian anggran.

Dalam konteks pengelola keuangan daerah salah satunya adalah pengelolaan dana perimbangan, dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Dana ini diberikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik (Djaenuri, 2012). Hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas DBH, DHU, dan DAK. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah, oleh sebab itu dana perimbangan sering diistilahkan dengan dana tranfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer fund*).

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Amalia et al., 2014).

Fenomena yang terjadi di provinsi sumatera selatan pada tahun 2015-2017 menunjukkan rasio keserasian anggran pada tahun 2015 rata-rata 71,51%, tahun 2016 rata-rata 81,18%, tahun 2017 rata-ratanya 71,94 %.dimana rasio keserasian ini saya perkecil dengan perhitungan per kabupaten/kota provinsi sumatera selatan. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat dalam mencakup kebutuhan belanja operasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah.

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut (Pambudi, 2008).

Pada penelitian ini objek yang dipilih yaitu kabupaten provinsi sumatera selatan yang didalamnya terjadi proses pengolahan data keserasian anggaran per kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESERASIAN ANGGARAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap keserasian anggaran ?
2. Bagaiman pengaruh keuangan daerah terhadap keserasian anggaran ?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, Penulis hanya membatasi pembahasan hanya pada rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, desentralisasi fiskal dan rasio keserasian total belanja operasi pada kabupaten/kota provinsi sumatera selatan.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap keserasian anggaran?
2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan penelitian selanjutnya lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menganalisis serta mempraktikkan teori-teori yang sudah didapatkan dipelajari pada dibangku perkuliahan, sehingga dapat mengetahui seberapa pemahaman dan penjabaran yang yang dapat dilakukan penelitian teori-teori yang dipelajari.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat dijadikan sumber referensi, literatur dan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Dana perimbangan dan kemandirian keuangan terhadap keserasian anggaran serta wawasan untuk pengembangannya.

I.5. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang akan menjelaskan alasan memilih judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan ^{tentang} landasan teori yang merupakan dasar analisis yang berkaitan dengan kinerja keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab IV, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.